

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Diajukan Oleh

STEVANY NATALIA PATRAS

4518013063



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FALKUTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Stevany Natalia Patras

Stambuk/NIM : 4518013063

Falkutas : Ekonomi dan Bisnis

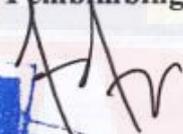
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.A. Arifuddin Manne, SE, M.Si, SH, MH.
NIDN: 0907077003


Indah Syamsuddin, SE, M.Ak
NIDN: 0931128605

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

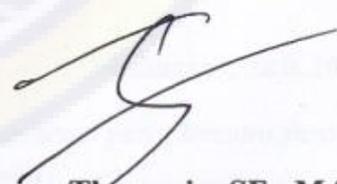
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Program Studi



Dr.Hj.Herminawaty, AB, SE., MM
NIDN: 0924126801

Akuntansi



Thanwain, SE., M.Si
NIDN: 0930016801

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : STEVANY NATALIA PATRAS
Nim : 4518013063
Jurusan : Akuntansi
Falkutas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan say aini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Stevany Natalia Patras

4518013063

***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT THE OFFICE OF STATE
PROPERTY SERVICES AND AUCTIONS (KPKNL) MAKASSAR DURING
THE COVID-19 PANDEMIC***

by :

STEVANY NATALIA PATRAS

***Department of Accounting Faculty of Economics and Business
University Bosowa***

ABSTRACT

STEVANY NATALIA PATRAS. 2022. Skripsi. Financial Performance Analysis at the Makassar State Assets and Auction Service Office (KPKNL) during the Covid-19 Pandemic, guided by Dr.H.A. Arifuddin Manne, SE., M. Si., SH., MH. and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

The purpose of this study was to find out how to analyze Financial Performance at the Makassar State Property and Auction Service Office (KPKNL) during the Covid-19 Pandemic.

The object of this research is the Makassar State Property and Auction Service Office (KPKNL). Analysis tool using Financial Ratios.

The results showed that when viewed from the activity ratio, routine expenditures and capital expenditures were not stable from year to year or not yet optimal. If viewed from the effectiveness ratio of financial performance at KPKNL, it can be said to be very effective because the average effectiveness ratio reaches more than 100%. And when viewed from the ratio of income growth has increased and is positive, whereas when viewed from the ratio of growth in income expenditure is negative, which means there is a decrease.

Keywords : Financial Performance, Covid-19

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR DIMASA
PANDEMI COVID-19**

Oleh :

STEVANY NATALIA PATRAS

Prodi Akuntansi Falkutas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

STEVANY NATALIA PATRAS. 2022. Skripsi. Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19 dibimbing oleh Dr.H.A. Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH. dan Indah Syamsuddin, SE.,M.Ak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19.

Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Alat Analisis menggunakan Rasio Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari rasio aktivitas nya belanja rutin dan belanja modal tidak stabil dari tahun ketahun atau belum optimal. Jika dilihat dari rasio efektivitas kinerja keuangan pada KPKNL bisa dikatakan sangat efektif karena karena rasio efektivitasnya rata-rata mencapai lebih dari 100%. Dan jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan dan bernilai positif, sedangkan jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan belanja bernilai negatif yang artinya ada penurunan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Covid-19

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasa Esa yang tiada pernah berhenti memberikan kesehatan, berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19” dengan baik dan tanpa kendala.

Skripsi ini disusun tidak lain untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada semua pihak telah ikhlas memberikan saran serta masukan yang berarti mulai dari proses persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty, AB, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
5. Kepada Bapak Dr.H.A. Arifuddin Manne, SE., M.Si., SH., MH dan Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sebagai Dosen Pembimbing atas

waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Falkutas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Kepada Bapak Harmaji selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar terima kasih karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KPKNL Makassar, kepada Ibu Lusia Agasty Prihantika selaku Kepala Subb Bagian Umum, dan Kak Fina Ghodah Almas, serta seluruh pegawai KPKNL Makassar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini bisa terlaksana tanpa adanya kendala.
8. Kepada Orang Tuaku Alm Papa yang semasa hidupnya tidak pernah berhenti memberikan dukungan, nasehat serta doa untuk anaknya, dan khususnya kepada Mama terima kasih telah merawat dan membesarkanku seorang diri dengan penuh cinta, memberikan dukungan baik moral maupun materil, nasehat, serta selalu membawaku didalam doa Terima Kasih Mama semoga Tuhan yang akan membalas segala kebaikan mu.
9. Kepada kakakku terima kasih telah memberikanku semangat dan selalu berdoa untukku, dan kepada seluruh keluarga besarku yang memberikan dukungan dan nasehat terima kasih untuk segalanya.

10. Saudara – saudara seperjuangan Angkatan 2018, khususnya buat kelas Akuntansi B, terima kasih telah memberikan kenangan yang indah selama empat tahun yang selalu ada disaat suka dan duka, semoga ini bisa menjadi cerita dan kenangan yang tidak pernah terlupakan.

11. Kepada para member Blackpink, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa terima kasih telah memotivasi dan memberikan inspirasi kepada penulis dalam menjalani masa – masa terberat selama semester akhir, Saranghae Uri Blackpink.

Harapan penulis, semoga skripsi yang telah dibuat ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik saran dan masukan yang membangun akan penulis terima untuk perbaikan kedepannya. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu demi penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan yang akan membalas segala kebaikan telah kalian berikan.

Makassar, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Laporan Keuangan	7
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan	7
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	8
2.2 Analisis Rasio Keuangan	9
2.2.1 Rasio Aktivitas	10
2.2.2 Rasio Efektivitas	11
2.2.3 Rasio Pertumbuhan	13
2.3 Kinerja Keuangan	14
2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan	15
2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan	16
2.4 Pandemi Covid-19	17
2.4.1 Covid-19	17

2.4.2 <i>Work From Home</i>	19
2.4.3 Kelebihan <i>Work From Home</i>	21
2.4.4 Kekurangan <i>Work From Home</i>	22
2.4.5 Indikator <i>Work From Home</i>	23
2.5 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.5 Definisi Operasional	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Instansi	34
4.2 Sejarah KPKNL Makassar	34
4.2.1 Visi dan Misi KPKNL Makassar	37
4.2.2 Struktur Organisasi	38
4.3 Uraian Tugas	40
4.4 Hasil Penelitian	44
4.4.1 Rasio Aktivitas	44
4.4.2 Rasio Efektivitas	46
4.4.3 Rasio Pertumbuhan	48
4.5 Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

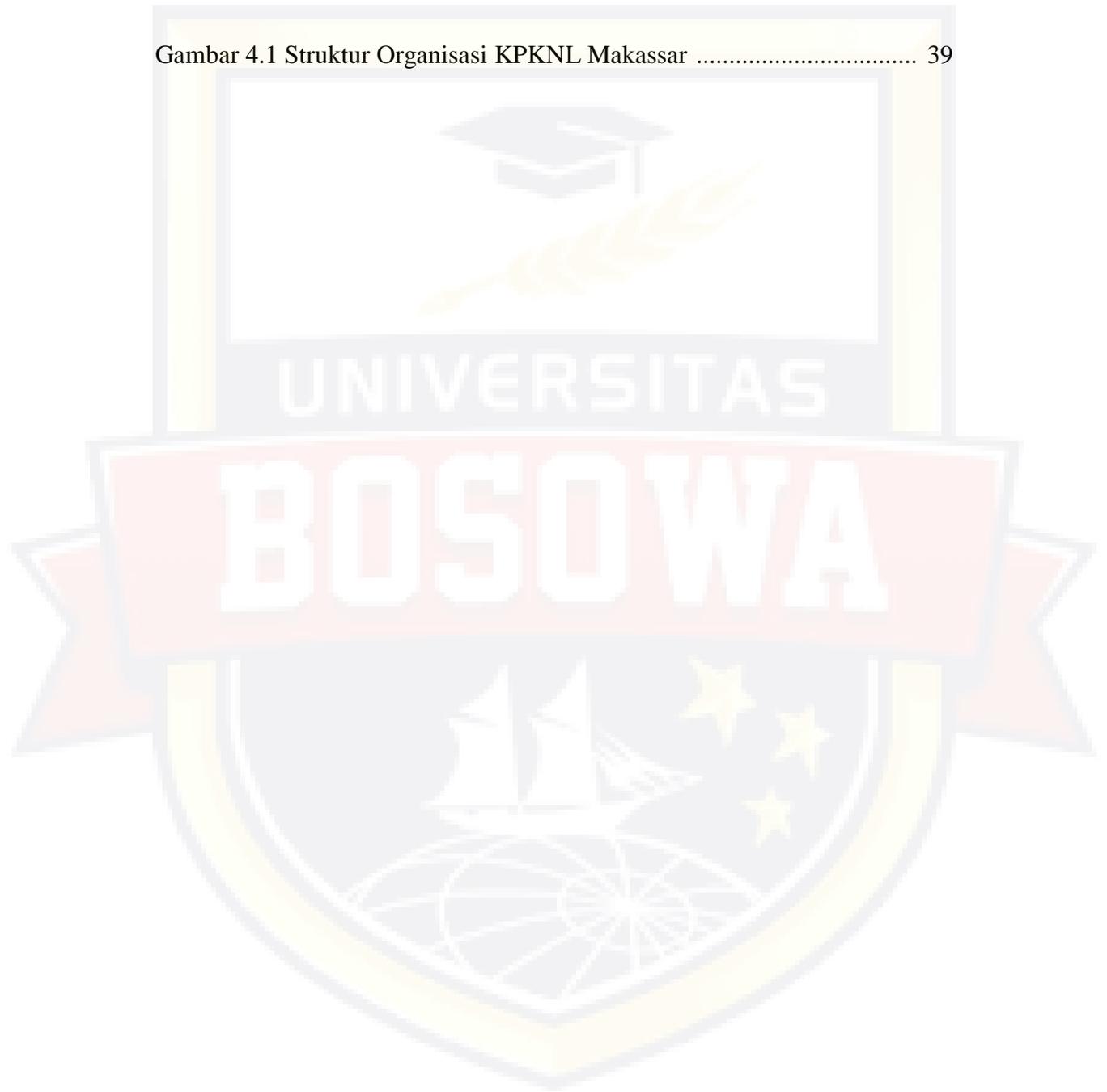
Tabel 2.1 Presentasi Kinerja Keuangan Efektivitas	12
Tabel 3.1 Presentasi Kinerja Efektivitas	30
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APB KPKNL Tahun 2019-2021	43
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, Modal	45
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Aktivitas KPKNL	46
Tabel 4.4 Presentasi Kinerja Keuangan Efektivitas	47
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas	48
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	49
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja	50

UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 24

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Makassar 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi APB 2019-2020 59

Lampiran 2 Laporan Realisasi APB 2020-2021 60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakang ini dunia mengalami suatu masalah kesehatan yang sangat serius yaitu penyebaran Corona Virus (Covid-19). Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sudah semakin membesar bahkan diseluruh dunia. Corona Virus (Covid-19) pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini merupakan penyakit yang mengganggu dibagian saluran pernapasan dan menyebar sangat cepat sehingga orang mengalami gejala kesulitan bernapas. Pada tanggal 20 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan fenomena penyebaran covid-19 ini menjadi pandemi. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang terkena pandemi covid-19, wabah ini sudah menyebar hampir seluruh bagian Indonesia. Pemerintah berusaha melakukan berbagai penanganan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Namun di penghujung 2020, sudah lebih dari 740 ribu orang terinfeksi covid-19, termasuk lebih dari 22 ribu orang meninggal dan Indonesia menjadi negara dengan kasus covid-19 terparah di Asia Tenggara.

Dampak dari pandemi covid-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat seluruh wilayah yang terjangkau termasuk Indonesia. Dengan munculnya covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran covid-19. Berbeda dengan negara lain yang melakukan

lockdown, pemerintah Indonesia dengan kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi. Namun meskipun begitu kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh perusahaan/instansi dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar.

Dimasa pandemi covid-19 sebagian perusahaan/instansi mengalami dampak krisis dari ekonomi yang membuat pemasukan di berbagai sektor menjadi turun, apalagi perusahaan/instansi perlu untuk meninjau kondisi keuangan perusahaan dimasa pandemi ini. Pengelolaan keuangan diperusahaan/instansi menjadi suatu keharusan apalagi dimasa pandemi seperti saat ini, karena dengan mengukur kinerja keuangan pada suatu instansi merupakan cara untuk melihat bagaimana kondisi keuangan, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya mengalami penurunan dan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atau tidak. Menurut Hery (2015) peluang dalam menumbuhkan dan mengembangkan keuangan pada suatu instansi dapat dilihat dengan cara mengukur kinerja keuangannya. Perusahaan atau instansi dapat dikatakan berhasil jika perusahaan telah mencapai suatu kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Susanto (2019) kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui kebijakan atau

ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dalam mencapai keberhasilan suatu kinerja, tolak ukur yang digunakan adalah ukuran kinerja pengelolaan keuangan, yang mana tolak ukur tersebut adalah alat penilaian strategi yang baik, agar dapat menetapkan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan akan dapat memperbaiki kinerja instansi secara berkelanjutan, jika dilakukannya *feedback* pada hasil pengukuran kinerja keuangan. Menurut Mahsun (2018) berdasarkan *feedback* hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun implementasinya.

Dalam melakukan pengukuran analisis kinerja keuangan pada suatu instansi pemerintah, dapat dilakukan dengan cara analisis rasio keuangan seperti analisis rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Menurut Susanto (2016), bahwa kondisi kesehatan keuangan instansi pemerintah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Rasio-rasio pengukuran kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada umumnya berbeda dengan rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pada suatu instansi pemerintah, karena pada instansi pemerintah tidak berpusat pada suatu keuntungan tetapi berpusat pada tanggung jawab sebagai media dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pemakai laporan. Fokus penelitian ini adalah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa pandemic covid-19, yang mana pendapatan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Untuk mengukur kinerja keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, maka dilakukan penganalisan dengan menggunakan analisis rasio efektivitas untuk melihat instansi pemerintah tersebut sudah efektif dalam merealisasikan pendapatan melebihi anggaran pendapatan; analisis rasio aktivitas dalam menilai bagaimana instansi pemerintah memprioritaskan alokasi dana belanja dalam anggaran, baik belanja rutin dan belanja modal apakah sudah optimal atau tidak; dan juga pada analisis rasio pertumbuhan melihat seperti apa perkembangan perolehan pendapatan dan belanja yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dengan dilakukannya analisis rasio dalam mengukur kinerja keuangan dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sudah berada pada ukuran yang benar sesuai tugas dan fungsi dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN), yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL memberikan pelayanan dibidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang. KPKNL adalah salah satu instansi yang terkena dampak dari pandemi ini, kinerja keuangan dimasa pandemic covid-19 memberikan dampak yang cukup memprihatinkan terhadap kondisi ekonomi keuangan khususnya dari segi pendapatan dan belanja, yang mengakibatkan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak ikut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi yang menurun sebagai dampak pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang ada pada KPKNL Makassar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar di Masa Pandemi Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah referensi dan sebagai acuan studi ilmiah untuk penelitian selanjutnya oleh mahasiswa atau orang lain yang ingin melakukan penelitian tentang Kinerja Keuangan di Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sarana dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja keuangan pada KPKNL Makassar.
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pendidikan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang lain.
3. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan atau pedoman dalam pengambilan kebijakan/keputusan, serta menjadi bahan koreksi instansi jika adanya kelemahan ketika mengukur dan mengelola kinerja keuangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan/instansi dengan membuat dan melaporkan hasil dari proses akuntansi aktivitas instansi, sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi serta kinerja keuangan instansi pada periode waktu tertentu. Menurut Hery (2015) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat dalam menentukan kebijakan instansi kedepannya dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik dari kelemahan dan kekuatan. Sebagai alat informasi dalam menghubungkan instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah salah satu fungsi dari laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, laporan keuangan terdiri dari beberapa macam antara lain:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Merupakan laporan yang menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, sehingga dapat terlihat perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

b. Laporan Neraca

Merupakan laporan yang menyajikan pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional

Merupakan laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/deficit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Menguraikan informasi kenaikan atau perubahan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan pada suatu instansi pemerintah sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.
2. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya instansi.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan serta biaya yang dikeluarkan oleh instansi pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan pada instansi dan berbagai informasi keuangan lainnya.
5. Untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya laporan keuangan suatu instansi, maka kondisi/kinerja keuangan pada instansi tersebut dapat diketahui secara menyeluruh, kemudian dapat dilakukannya analisis keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang sering dilakukan seperti dengan cara membandingkan angka-angka (pos) pada laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Perbandingan ini dikenal dengan analisis rasio keuangan.

2.2 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Hery (2016:138) rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Pada hasil perbandingan antara perkiraan-perkiraan, laporan keuangan harus menunjukkan hubungan yang sistematis, relevan, dan signifikan agar hasil dapat diinterpretasikan. Analisis rasio

juga merupakan bagian dari analisis keuangan. Salah satu alat menganalisis keuangan pada suatu instansi/perusahaan yang paling populer dan banyak digunakan oleh para akuntan publik adalah analisis rasio. Rasio yang digunakan dalam menganalisis keuangan harus sebuah rasio yang dapat mengacu pada hubungan ekonomis yang penting, sehingga rasio dapat diinterpretasi secara hati-hati. Agar perhitungan rasio dapat dilakukan secara bermanfaat, rasio dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, atau dengan standar yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Hery (2016:139) sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, maka dalam menilai atau mengukur kinerja instansi digunakan beberapa rasio secara bersamaan. Beberapa rasio keuangan pada penelitian ini dapat digunakan untuk perusahaan yang tidak mencari keuntungan/laba atau dapat disebut juga instansi pemerintah adalah rasio aktivitas, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

2.2.1 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan dalam menganalisis keuangan pada instansi pemerintah untuk menilai alokasi dana belanja dalam anggaran, baik belanja rutin dan belanja modal apakah sudah optimal atau tidak. Menurut Halim (2011:72) dalam pengukuran aktiva yang dimiliki perusahaan apakah sudah efektivitas, maka rasio yang digunakan adalah rasio aktivitas. Presentase belanja modal yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil berarti presentase dana pada pengalokasian dana rutin semakin tinggi. Agar

dapat menghitung rasio aktivitas maka berikut formula pada rasio aktivitas Kasmir (2011).

Rasio Belanja Rutin (operasional) adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin (Belanja Pegawai + Belanja Barang)}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Kasmir, 2011)

Rasio Belanja Pembangunan (Modal) adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Kasmir, 2011)

2.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan instansi dalam mewujudkan realisasi pendapatannya yang kemudian akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan (Harahap, Ma'sut, Ilmiha, Effendi, 2021:41). Rasio efektivitas adalah gambaran hubungan antara target atau suatu sasaran yang harus dicapai dengan pencapaian hasil program. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan/pendapatan dengan target penerimaan/pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Pengukuran kemampuan dalam rasio efektivitas memiliki bermacam-macam

tergantungan terhadap sasaran yang akan dicapai. Kegiatan operasi yang memiliki produk akhir telah mencapai tujuannya dilihat dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

Menurut Beny (2016:69) efektivitas juga berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga kegiatan dapat dikatakan efektif ketika kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kekuatan dalam penyediaan layanan untuk masyarakat atas target yang telah ditentukan. Apabila suatu instansi telah mencapai tujuan maka instansi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam menganalisis diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Semakin besar presentase yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan instansi tersebut. Berikut ini formula dalam menghitung analisis efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2015)

Adapun kriteria penilaian efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Presentase Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

2.2.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio untuk mengukur kemampuan instansi pemerintah dengan meningkatkan keberhasilan dan mempertahankan atas apa yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Susanto, 2019). Analisis pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kecenderungan seperti kenaikan atau penurunan dari kinerja keuangan selama kurun waktu tertentu. Agar lebih terperinci dalam menganalisis rasio pertumbuhan, maka pada rasio pertumbuhan dibagi menjadi dua rasio dalam menganalisis, yang pada masing-masing rasio pertumbuhan memiliki manfaat yang berbeda yaitu:

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio ini bermanfaat agar dapat mengetahui kinerja anggaran pada instansi pemerintah tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Ketika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan menandakan hasil negatif maka terjadinya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya jika hasil kinerja anggaran mengalami pertumbuhan positif maka adanya peningkatan atas kinerja pendapatan.

Adapun rumus rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan:

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } T_h t - \text{Pendapatan Tahun } T_h (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } T_h (t-1)} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun pada suatu instansi pemerintah. Pertumbuhan belanja pada umumnya cenderung mengalami kenaikan, karena kenaikan belanja dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Adapun rumus rasio pertumbuhan belanja sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja:

$$\frac{\text{Belanja Tahun } T_h t - \text{Belanja Tahun } T_h (t-1)}{\text{Belanja Tahun } T_h (t-1)} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Keterangan: Th t = tahun yang dihitung, Th (t-1) = tahun sebelumnya

2.3 Kinerja Keuangan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2012:25) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan gambaran hasil dari pencapaian tujuan suatu organisasi terhadap kegiatan atau program yang telah direncanakan. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka

dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Namun apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik.

Kinerja pada suatu organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan non keuangan. Pada kinerja keuangan digambarkan dengan berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Contoh dari kinerja keuangan adalah ketika tercapainya realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja non keuangan adalah pengukuran yang dilakukan dalam satuan fisik dan lebih terfokus pada salah satu aspek kinerja. Agar dapat menentukan apakah kinerja keuangan pada suatu instansi berjalan dengan baik maka perlu untuk dilakukan pengukuran kinerja keuangan.

2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Adapun tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.3.3 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Manfaat penilaian kinerja keuangan di instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai monitor dan bahan evaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
2. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
3. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Barus, Sudjana, dan Sulasmiyati (2017:6) manfaat dari penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman lebih baik mengenai pengelolaan utang termasuk mengenai keadaan keuangan secara keseluruhan.
2. Mengidentifikasi lebih awal masalah keuangan yang timbul sebelum terlambat.
3. Mengidentifikasi masalah keuangan yang ada yang mungkin tidak disadari oleh perusahaan/instansi.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai kelebihan dan kekurangan keadaan keuangan dan cara pengelolaan piutang.

2.4 Pandemi Covid-19

2.4.1 Covid-19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya penyakit ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akur berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Menurut World Health Organization (WHO), Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini awalnya tidak dikenal sebelum mulainya virus wabah di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia.

Fenomena pandemi covid-19 membuat dunia terhenyak akan perubahan yang begitu cepat terjadi, baik aktivitas kehidupan masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi, dimana kesehatan dan nyawa jadi taruhannya. Parahnya lagi, hal itu terjadi dalam tempo waktu yang cepat dan skala yang luas. Dalam rangka meminimalisir penyebaran covid-19 di Indonesia, Presiden Indonesia Joko Widodo melalui konferensi pers Istana Bogor, Jawa Barat 15 Maret 2020 mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah. Himbauan Presiden ini bagi instansi dikenal dengan nama atau istilah *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Himbauan ini berlaku untuk semua wilayah terutama pada daerah yang banyak terpapar virus covid-19 atau dikatakan berzona merah.

Pandemi yang terjadi saat ini memberi keresahan pada masyarakat Indonesia maupun dunia akan tersebarnya virus yang berdampak pada Kesehatan apabila segala aktivitas diluar rumah tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang diatur (peraturan perundang-undangan no 21, 2020) mengenai PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memutus

rantai penyebaran covid-19. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedomanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19, bertujuan untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Pasal 12 Bab III Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Permenkes No. 9 tahun 2020 dalam Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) telah ditetapkan oleh menteri, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Dan masyarakat tetap harus mematuhi dan menaati PSBB selama wabah agar dapat memutus tali rantai covid-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan.

Sejak pemberlakuan PSBB segala kegiatan dan aktivitas yang ada di tengah masyarakat menjadi terbatas. Salah satu dampak sosial dari PSBB yaitu *Work From Home* (WFH) atau istilahnya bekerja dari rumah. *Work From Home* (WFH) adalah aktivitas bekerja yang semula dilakukan di kantor namun dipindahkan ke rumah. Setiap karyawan atau pegawai tidak diperkenankan masuk kantor melainkan tetap bekerja dari rumah sesuai aturan yang diberlakukan di kantor baik itu instansi pemerintahan atau perusahaan.

2.4.2 Work From Home

Work from home adalah salah satu istilah bekerja dari jarak jauh (*remote working*) lebih tepatnya melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya (Ashal, 2020). *Work from home* adalah bekerja dari rumah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai bidang masing-masing demi mencegah resiko tertular Covid-19. Kebijakan *work from home* atau bekerja dari rumah dilakukan demi meminimalisir dampak dan penyebaran virus corona. Mengingat perkembangan covid-19 semakin meningkat, membuat kegiatan diluar rumah semakin dibatasi. Pembatasan kegiatan diluar rumah tidak hanya berdampak pada kegiatan disektor informal, namun juga pada sektor formal, pada kenyataannya kedua sektor tersebut memiliki keterikatan satu sama lain. Apabila kegiatan ekonomi pada sektor formal juga akan mengalami hambatan, dampak yang terjadi pendapatan atau tenaga kerja akan menurun. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan bagi tenaga kerja, karena pendapatan merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan sekeluarga, serta menjadi sumber pembelanjaan masyarakat (Gilarso, 2003). Indonesia sebagai negara berkembang sangat merasakan dampak munculnya virus covid-19 terhadap pergerakan perekonomian apalagi bagi kantor/instansi yang menerapkan sistem *work from home*.

Seiring pelaksanaan *work from home* yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 muncul berbagai masalah yang salah satunya adalah apakah kinerja pegawai yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Karena permasalahan kinerja pegawai dapat dilihat dari berbagai aspek seperti halnya pegawai untuk

menyelesaikan pekerjaannya walaupun harus bekerja dari rumah, bisakah dikerjakan sesuai Standar Kerja/System Operasional Procedure (SOP), tepat waktu dan rasa tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi (Agustina & Aziz, 2020). Belum lagi masih ada anggapan kalau work from home sama dengan cuti, sehingga kinerjanya menjadi rendah karena waktu yang ada tidak dipergunakan sebagai mana mestinya.

Work from home di tengah pandemi Covid-19 tentu akan memberikan perubahan suasana bekerja bagi para pegawai. Menurut Crosbie & Moore (2004), Bekerja dari rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam per minggu). Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja untuk memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan. Disisi lain juga memberikan keuntungan bagi organisasi.

2.4.3 Kelebihan *Work From Home*

Bila dibandingkan dengan dengan bekerja secara normal dikantor, bekerja dari rumah atau *work from home* memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Biaya operasional menurun

Kelebihan dari penerapan *work from home* yang peratama adalah biaya operasional kantor menjadi menurun, tidak perlu menyediakan computer, tempat kerja, internet, listrik, dan makan siang untuk pekerja.

2. Lebih fleksibel

Dalam bekerja, *work from home* lebih fleksibel terutama saat bosan bekerja, bisa pindah dari meja kerja menuju ruang tamu, teras, taman,

kamar atau ruangan lain dirumah yang nyaman untuk bekerja. Selain fleksibel masalah tempat bekerja, dalam hal waktu *work from home* juga fleksibel bisa disesuaikan yang terpenting saat bekerja dari rumah, karyawan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

3. Produktivitas meningkat

Statistik dari website emailanalytics.com menjelaskan bahwa 77% pekerja *work from home* produktifitas kerjanya meningkat. Ini terjadi karena tingkat stress bekerja semakin berkurang sehingga produktifitas kerja bertambah. Beberapa hal bisa menyebabkan stress seperti macet di jalan, pekerjaan yang menumpuk, masalah teman kerja dan masalah lain-lain yang sering ditemui dikantor yang menyebabkan kurangnya semangat kerja.

4. Kepuasan kerja meningkat

Tingkat stress yang menurun membuat kepuasan bekerja semakin meningkat. Ketika mampu menyelesaikan pekerjaan lebih baik dan cepat. Tentu ini akan meningkatkan kepuasan kerja sehingga karyawan menjadi loyal terhadap perusahaan.

5. *Work life balance* meningkat

Work life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja dari rumah, karyawan bisa lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga *balance* terpenuhi. Keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan ini bisa tercapai saat

dirinya memiliki produktifitas kerja yang baik sehingga bisa mengalokasi waktu sesuai dengan porsinya masing-masing.

6. Terhindar dari gangguan lingkungan kerja

Seringkali terdapat teman kerja dalam satu kantor yang bersifat *toxic*, mengganggu atau sering membuat masalah. Orang-orang seperti ini sangat mengganggu dalam hal produktivitas kerja. Belum lagi gangguan yang lain yang ada di kantor yang banyak mempengaruhi dalam hal mood bekerja dan produktifitas. Berbeda dengan Ketika bekerja dari rumah yang suasana lebih nyaman, tenang dan kondusif sehingga lebih fokus dalam bekerja.

7. Lebih dekat dengan keluarga

Bekerja dari rumah secara langsung akan lebih dekat dengan keluarga, apalagi bagi yang memiliki anak kecil yang membutuhkan perhatian seorang orang tua.

2.4.4 Kekurangan *Work From Home*

Selain memiliki kelebihan, bekerja dari rumah atau *work from home* juga memiliki kekurangan yang tidak didapatkan bila bekerja dilaksanakan secara normal di kantor. Kekurangan tersebut adalah:

1. Sulit melakukan monitoring pekerja

Untuk memonitoring pekerja saat melakukan *work from home* lebih susah dibandingkan saat bekerja di kantor secara langsung. Diperlukan system yang baik untuk memonitoring setiap pekerja dan tidak terlalu kaku dalam hal peraturan, agar hal ini tidak menjadi masalah yang besar.

2. Hilangnya motivasi kerja

Motivasi kerja bisa hilang karena suasana berbeda jauh dengan kerja di kantor. Apalagi godaan dirumah lebih banyak dan tidak ada pengawasan dari atasan langsung, sehingga membuat motivasi kerja lama kelamaan menjadi hilang. Salah satu tandanya dengan pekerjaan yang selalu telat dari deadline yang sudah ditentukan.

3. Miskomunikasi

Komunikasi menjadi tantangan terbesar saat melakukan *work from home*. Untuk itu harus selalu online dan mudah dihubungi, sehingga saat ada diskusi atau koordinasi tidak ketinggalan info. Frekuensi komunikasi juga harus dilakukan sesering mungkin untuk menjaga komunikasi antar tim bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi

4. Masalah Keamanan Data

Keamanan data menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan Ketika *work from home*. Data-data pekerjaan yang penting tidak disarankan untuk dikirim menggunakan jaringan biasa. Untuk melakukan proteksi keamanan lebih perlu menggunakan layanan keamanan dengan VPN. VPN memungkinkan untuk membuat saluran aman dalam jaringan publik, sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali hanya pengirim dan penerima saja.

5. Biaya operasional rumah meningkat

Semua biaya operasional bekerja secara otomatis pindah semuanya saat kerja dari rumah. Mulai dari listrik, internet dan makanan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari kantor.

6. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah

Kekurangan work from home yang terakhir adalah tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

2.4.5 Indikator *Work From Home*

Menurut Timbal dan Mustabat (2016) dalam Farrell Kathleen (2017), terdapat indikator dari *work from home* diantaranya adalah :

1. Lingkungan Kerja Fleksibel

Lingkungan kerja yang memberikan pegawai kesempatan untuk memilih sendiri terkait dengan bagaimana, kapan dan dimana pegawai terlibat dalam tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

2. Gangguan Stress

Gangguan stress dapat disebabkan oleh stimulus yang berubah menjadi berat dan berkepanjangan sehingga seseorang sulit menghadapinya dan biasanya muncul karena permasalahan hidup dan gangguan sehari-hari

3. Kedekatan Dengan Keluarga

Peranan keluarga penting bagi seseorang untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatannya.

4. Waktu Perjalanan

Waktu perjalanan adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu.

5. Kesehatan dan Keseimbangan Kerja

Menjaga Kesehatan dan keseimbangan kerja bagi seseorang adalah suatu hal yang penting dan harus diperhatikan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.

6. Kreativitas dan Produktivitas Tinggi

Kreativitas diperlukan untuk selalu memberikan ide dalam pemecahan masalah.

UNIVERSITAS
BOSOWA



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Susanto (2019) Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis merupakan sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Berdasarkan kerangka pikir yang yang diperoleh diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini sebagai berikut: “Diduga Kinerja Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar di masa Pandemi Covid-19 Tidak Efektif”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Berlokasi dalam kompleks Gedung Keuangan Negara Makassar, pada Gedung Keuangan Negara 1 Lantai 2, Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini direncanakan dua bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada empat cara yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Pustaka, adalah metode pengumpulan data mempelajari dari jurnal dan mencari sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan sebagai referensi dalam penyusunan tugas akhir.
2. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data informasi dengan cara melihat dan menelusuri secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
3. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data informasi mengenai hal-hal yang terkait dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif adalah jenis data yang nilainya bisa diukur dalam bentuk angka dan hitungan, dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah berupa data-data laporan keuangan yang ada di KPKNL Makassar.
2. Data Kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Dalam penelitian ini data kualitatif yaitu berupa gambaran umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, jumlah pegawai, struktur organisasi, dan uraian tugas seluruh pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi berupa pengamatan secara langsung serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai data-data yang diperlukan. Dalam hal ini, informan yaitu pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
2. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan instansi terkait dan sumber lainnya berupa laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran

pendapatan, dan belanja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta secara akurat dan jelas melalui pertimbangan rasio kinerja keuangan. Menurut (Sijabat, Saleh, dan Wachid, 2014:5) penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Kuantitatif yaitu, data-data yang dikumpulkan peneliti berupa angka-angka yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik-teknik perhitungan matematik (Harahap, Mas'ut, Ilmiha, Effendi, 2021:41). Deskriptif Kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk melihat, meninjau dan menggambarkan dengan angka tentang objek yang teliti seperti apa adanya dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut sesuai dengan fakta atau fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kinerja keuangan instansi dimasa pandemi covid-19, yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk

mengetahui kinerja keuangan KPKNL kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Adapun rasio keuangan yang akan dipakai untuk mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Aktivitas, digunakan dalam menganalisis keuangan pada instansi pemerintah untuk menilai alokasi dana belanja dalam anggaran, baik belanja rutin dan belanja modal apakah sudah optimal atau tidak. Menurut Halim (2011:72) dalam pengukuran aktiva yang dimiliki perusahaan apakah sudah efektivitas, maka rasio yang digunakan adalah rasio aktivitas. Presentase belanja modal yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil berarti presentase dana pada pengalokasian dana rutin semakin tinggi. Agar dapat menghitung rasio aktivitas maka berikut formula pada rasio aktivitas menurut (Kasmir (2011)).

Rasio Belanja Rutin (operasional) adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin (Belanja Pegawai + Belanja Barang)}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Kasmir, 2011)

Rasio Belanja Pembangunan (Modal) adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Kasmir, 2011)

2. Rasio Efektivitas, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan instansi dalam mewujudkan realisasi pendapatannya yang kemudian akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan (Harahap, Ma'sut, Ilmiha, Effendi, 2021:41). Dapat dikatakan efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Jadi semakin besar nilai suatu rasio efektivitasnya, maka semakin baik kinerja keuangannya.

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2015)

Tabel 3.1 Presentase Kinerja Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%–100%	Efektif
80%–90%	Cukup Efektif
60%–80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

3. Rasio Pertumbuhan, adalah untuk mengukur kemampuan instansi pemerintah dengan meningkatkan keberhasilan dan mempertahankan atas apa yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan

kecenderungan seperti kenaikan atau penurunan dari kinerja keuangan selama kurun waktu tertentu. Agar lebih terperinci dalam menganalisis rasio pertumbuhan, maka pada rasio pertumbuhan dibagi menjadi dua rasio dalam menganalisis, yang pada masing-masing rasio pertumbuhan memiliki manfaat yang berbeda yaitu:

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio ini bermanfaat agar dapat mengetahui kinerja anggaran pada instansi pemerintah tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Ketika kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan menandakan hasil negatif maka terjadinya penurunan kinerja pendapatan. Sebaliknya jika hasil kinerja anggaran mengalami pertumbuhan positif maka adanya peningkatan atas kinerja pendapatan. Adapun rumus rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Total pendapatan:

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } T_h t - \text{Pendapatan Tahun } T_h(t-1)}{\text{Pendapatan } T_h(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

b. Rasio Pertumbuhan Belanja, adalah rasio yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun pada suatu instansi pemerintah. Pertumbuhan belanja pada umumnya cenderung mengalami kenaikan, karena kenaikan belanja dikaitkan

dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan nilai mata uang dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Adapun rumus rasio pertumbuhan belanja sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja:

$$\frac{\text{Belanja Tahun } T_{ht} - \text{Belanja Tahun } T_{h(t-1)}}{\text{Belanja Tahun } T_{h(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2016)

Keterangan: $T_h t$ = tahun yang dihitung, $T_h (t-1)$ = tahun sebelumnya

3.5 Definisi Operasional

1. Laporan keuangan, merupakan sebuah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan/instansi yang dapat dipakai untuk melihat kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Analisis rasio keuangan, merupakan suatu alat dalam menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan/instansi dengan menggunakan parameter kondisi kesehatan keuangan perusahaan/instansi tersebut. Analisis rasio keuangan ini berupa metode yang biasa digunakan untuk melakukan analisis dengan menghitung nilai rata-rata terhadap laporan keuangan dan menjelaskan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan tersebut.
3. Kinerja keuangan, merupakan gambaran kondisi keuangan atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan pada suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Dalam mengukur

kinerja keuangan perlu dilakukannya analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas dibidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang juga memberikan pelayanan publik secara sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan fungsi serta perannya dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good govermence). KPKNL juga melayani pelayanan publik berupa melakukan pelayanan lelang, tidak berupa lelang hak tanggungan saja, tetapi bisa melakukan pelayanan bagi masyarakat biasa bagi yang menjual harta kekayaannya sendiri dengan syarat yang telah ditentukan.

4.2 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49

Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

4.2.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

Visi DJKN:

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merelasasikan Visi DJKN maka ditetapkan Misi DJKN adalah sebagai berikut:

Misi DJKN

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata Kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

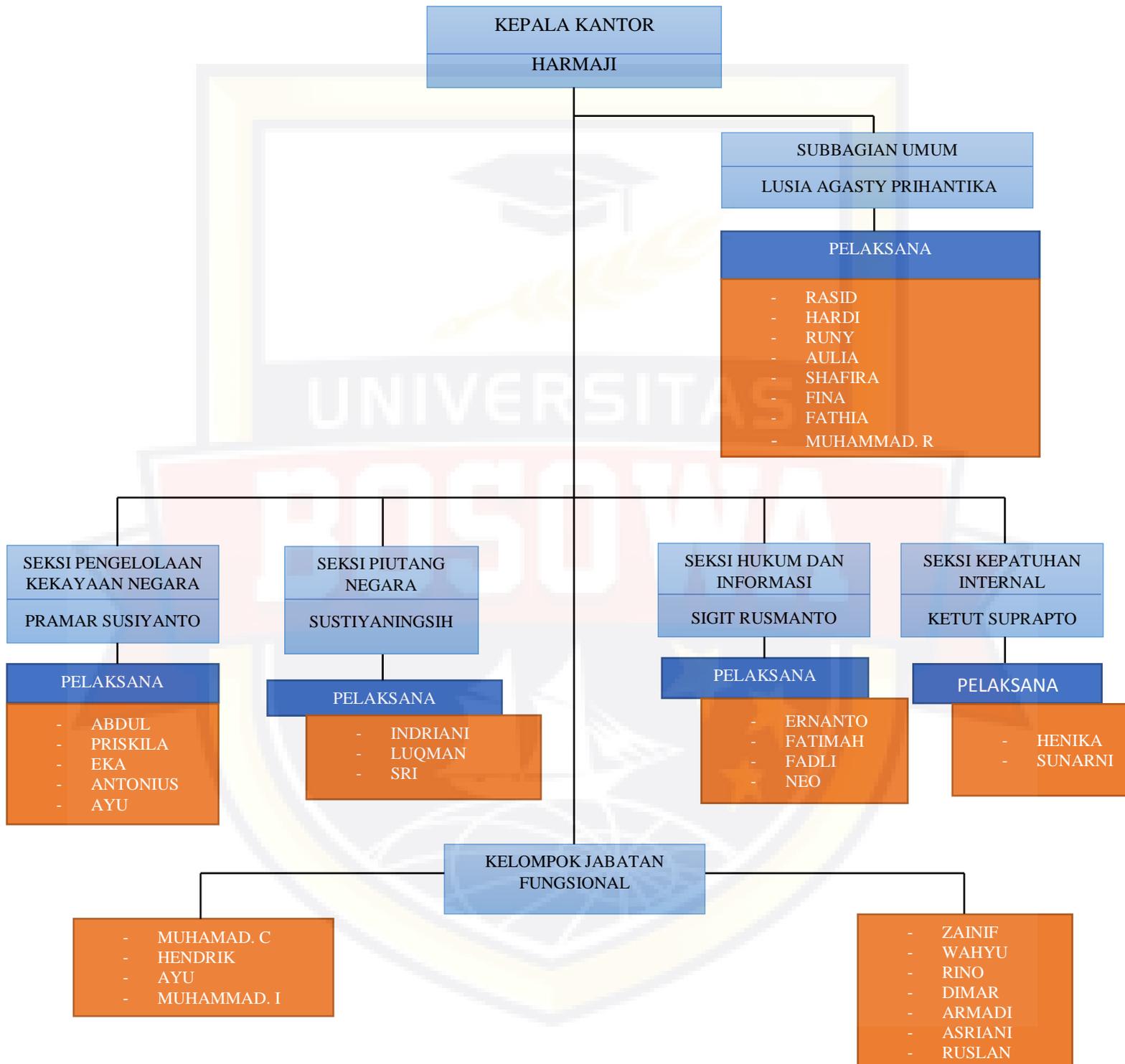
4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pada suatu organisasi atau perusahaan, karena di dalam struktur organisasi terdapat garis pendelegasian wewenang yang seharusnya dilakukan. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisi dalam suatu organisasi tersebut. Sebagaimana struktur organisasi yang ada menggambarkan pembagian kerja, serta tugas-tugas atau tanggung jawab yang dijalankan dari masing-masing unit.

DJKN merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melakukan kebijakan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

DJKN menerapkan bentuk struktur organisasi lini. bentuk struktur organisasi lini adalah bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan ke bawahannya. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industry pertama, bentuk organisasi lini ini diciptakan oleh Henry fayol. Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Makassar



(Sumber: KPKNL Makassar, 2022)

4.2.3 Uraian Tugas

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah. KPKNL Makassar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang. Berikut susunan dan tugas organisasi pada KPKNL Makassar:

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Uraian tugas dan kegiatan Kepala Kantor Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Seksi Pelayanan Penilaian Seksi Piutang Negara Seksi Pelayanan Lelang Seksi Hukum Informasi Sub Bagian Umum

- 1) Menyelenggarakan urusan penerimaan penolakan pengembalian penyerahan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyelenggarakan penerbitan pernyataan bersama PB atau surat keputusan penetapan jumlah piutang negara PJPN.
- 3) Menyelenggarakan penatausahaan, pengamanan, dan pendayagunaan dokumen dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lain.
- 4) Menyelenggarakan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa SP dalam rangka penagihan piutang negara.

2. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

4. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap objek-objek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

5. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksana paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan

piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/pinjaman hutang yang diperdagangkan dibursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

6. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan dan grosse risalah, dan penatausahaan hasil lelang.

7. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas dan laporan tahunan penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

8. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik, disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Deskripsi Data

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Kantor Pelayanan Keyaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19. Adapun sumber data yang digunakan adalah yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2021. Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019-2020:

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Makassar 2019-2021
(dalam rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
Pendapatan	14.578.624.321	14.911.170.933	24.377.910.536
Anggaran Pendapatan	12.150.890.000	12.959.699.000	13. 478.286.000
Belanja	4.582.638.535	4.908.002.288	1.470.441.379

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

Berdasarkan table 4.1 diatas, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Adapun untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa pandemic Covid-19 yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Rasio Aktivitas

Rasio ini dipakai dalam menganalisis keuangan pada instansi pemerintah untuk menilai alokasi dana belanja dalam anggaran, baik belanja rutin dan belanja modal apakah sudah optimal atau tidak. Menurut Hery Susanto (2019:84) rasio ini menggambarkan bagaimana instansi lebih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja pegawai dan belanja barang) dan juga belanja modal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana cenderung semakin kecil. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Aktivitas adalah:

Rasio Belanja Rutin adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin (Belanja Pegawai + Belanja Barang)}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan (Modal) adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Laporan keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Laporan Realisasi Belanja Pegawai, Barang dan Modal Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Tahun 2019-2021**
(dalam rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	2.574.550.702	1.910.267.067	0
Belanja Barang	1.658.080.658	2.128.341.749	1.449.771.379
Belanja Modal	350.007.175	869.393.472	20.670.000

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

Perhitungan Rasio Aktivitas Pengelolaan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar Tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Rasio Aktivitas Belanja Rutin (Operasional):

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}(\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang})}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.4.232.631.360}}{\text{Rp.4.582.638.535}} \times 100\% = 92,36\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.4.038.608.816}}{\text{Rp.4.908.002.288}} \times 100\% = 82,28\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.1.449.771.379}}{\text{Rp.1.470.441.379}} \times 100\% = 98,59\%$$

Rasio Belanja Pembangunan (Modal):

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.350.007.175}}{\text{Rp.4.582.638.535}} \times 100\% = 7,63\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.869.393.472}}{\text{Rp.4.908.002.288}} \times 100\% = 7,71\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.20.670.000}}{\text{Rp.1.470.441.379}} \times 100\% = 1,40\%$$

Tabel 4.3

Perhitungan Rasio Aktivitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Tahun 2019-2021

(dalam rupiah)

Tahun	Total Belanja Rutin	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rutin %	Modal %
2019	4.232.631.360	350.007.175	4.582.638.535	92,36%	7,63%
2020	4.038.608.816	869.393.472	4.908.002.288	82,28%	7,71%
2021	1.449.771.379	20.670.000	1.470.441.379	98,59%	1,40%

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

4.4.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan atau pendapatan dengan target yang telah dianggarkan sebelumnya. Rasio ini menggambarkan kemampuan instansi dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100% maka kemampuan instansi bisa dikatakan efektif. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas adalah:

Rasio Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Tahun 2019-2021 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.14.578.624.321}}{\text{Rp.12.150.890.000}} \times 100\% = 120\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.14.911.170.933}}{\text{Rp.12.959.699.000}} \times 100\% = 115\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.24.377.910.536}}{\text{Rp.13.478.286.000}} \times 100\% = 181\%$$

Tabel 4.4

Presentase Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
(KPKNL) Makassar 2019-2021

(dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektivitas	Kriteria Penilaian
2019	12.150.890.000	14.578.624.321	120%	Sangat Efektif
2020	12.959.699.000	14.911.170.933	115%	Sangat Efektif
2021	13.478.286.000	24.377.910.536	181%	Sangat Efektif

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

4.4.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kecenderungan seperti kenaikan atau penurunan dari kinerja keuangan selama kurun waktu tertentu. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan maka kinerja keuangan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan:

$$= \frac{\text{Pendapatan Tahun}_{Th\ t} - \text{Pendapatan Tahun}_{Th(t-1)}}{\text{Pendapatan Tahun}_{Th(t-1)}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja:

$$= \frac{\text{Belanja Tahun}_{Th\ t} - \text{Belanja Tahun}_{Th(t-1)}}{\text{Belanja Tahun}_{Th(t-1)}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)11 Makassar
(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2019	14.578.624.312	4.582.638.535
2020	14.911.170.933	4.908.002.288
2021	24.377.910.536	1.470.441.379

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

Perhitungan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Tahun 2018-2021, sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan:

$$= \frac{\text{Pendapatan Tahun } T_{h t} - \text{Pendapatan Tahun } T_{h(t-1)}}{\text{Pendapatan Tahun } T_{h(t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.14.578.624.312} - \text{Rp.12.936.663.549}}{\text{Rp.12.936.663.549}} \times 100\% = 12,69\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.14.911.170.933} - \text{Rp.14.578.624.321}}{\text{Rp.14.578.624.321}} \times 100\% = 22,81\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.24.377.910.536} - \text{Rp.14.911.170.933}}{\text{Rp.14.911.170.933}} \times 100\% = 63,48\%$$

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar Tahun 2018-2021, sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Belanja:

$$= \frac{\text{Belanja Tahun } T_h t - \text{Belanja Tahun } T_h (t-1)}{\text{Belanja Tahun } T_h (t-1)} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.4.582.638.535} - \text{Rp.5.104.993.678}}{\text{Rp.5.104.993.678}} \times 100\% = -1,02\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.4.908.002.288} - \text{Rp.4.582.638.535}}{\text{Rp.4.585.638.535}} \times 100\% = 7,09\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp.1.470.441.379} - \text{Rp.4.908.002.288}}{\text{Rp.4.908.002.288}} \times 100\% = -7,00\%$$

Tabel 4.7

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar
Tahun 2019-2021
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja
2019	14.578.624.312	4.582.638.535	12,69%	-1,02%
2020	14.911.170.933	4.908.002.288	22,81%	7,09%
2021	24.377.910.536	1.470.441.379	63,48%	-7,00%

Sumber: KPKNL Makassar (data diolah, 2022)

4.5 Pembahasan

Dapat dilihat pada tabel 4.3 rasio aktivitas bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 rasio aktivitas belanja rutin adalah 92,36%, kemudian pada tahun 2020 awal masuk nya Covid-19 rasio aktivitas belanja rutin turun menjadi 82,28% dan ditahun 2021 naik menjadi 98,59%. Sedangkan jika dilihat dari rasio aktivitas belanja modal pada tahun 2019 sebesar 7,63%, di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,71%, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 1,40%. Rasio aktivitas belanja rutin KPKNL Makassar sangat tinggi jika dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja modal pada tiga tahun terakhir. Dari data yang dipaparkan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa KPKNL Makassar lebih memprioritaskan belanja rutin dibanding belanja modal, yang berararti bahwa sebagian dana yang dimiliki oleh instansi masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang. Sehingga dapat dikatakan belanja rutin dan belanja modal tidak stabil dari tahun ke tahun atau belum optimal.

Rasio efektifitas berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan bagaimana keadaan disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio efektifitas adalah 120% (sangat efektif), kemudian ditahun 2020 sebesar 115% (sangat efektif), dan ditahun 2021 rasio efektifitas sebesar 181% (sangat efektif). Realisasi terhadap penerimaan atau pendapatan pada KPKNL Makassar sangat efektif, karena melebihi dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena target pendapatan

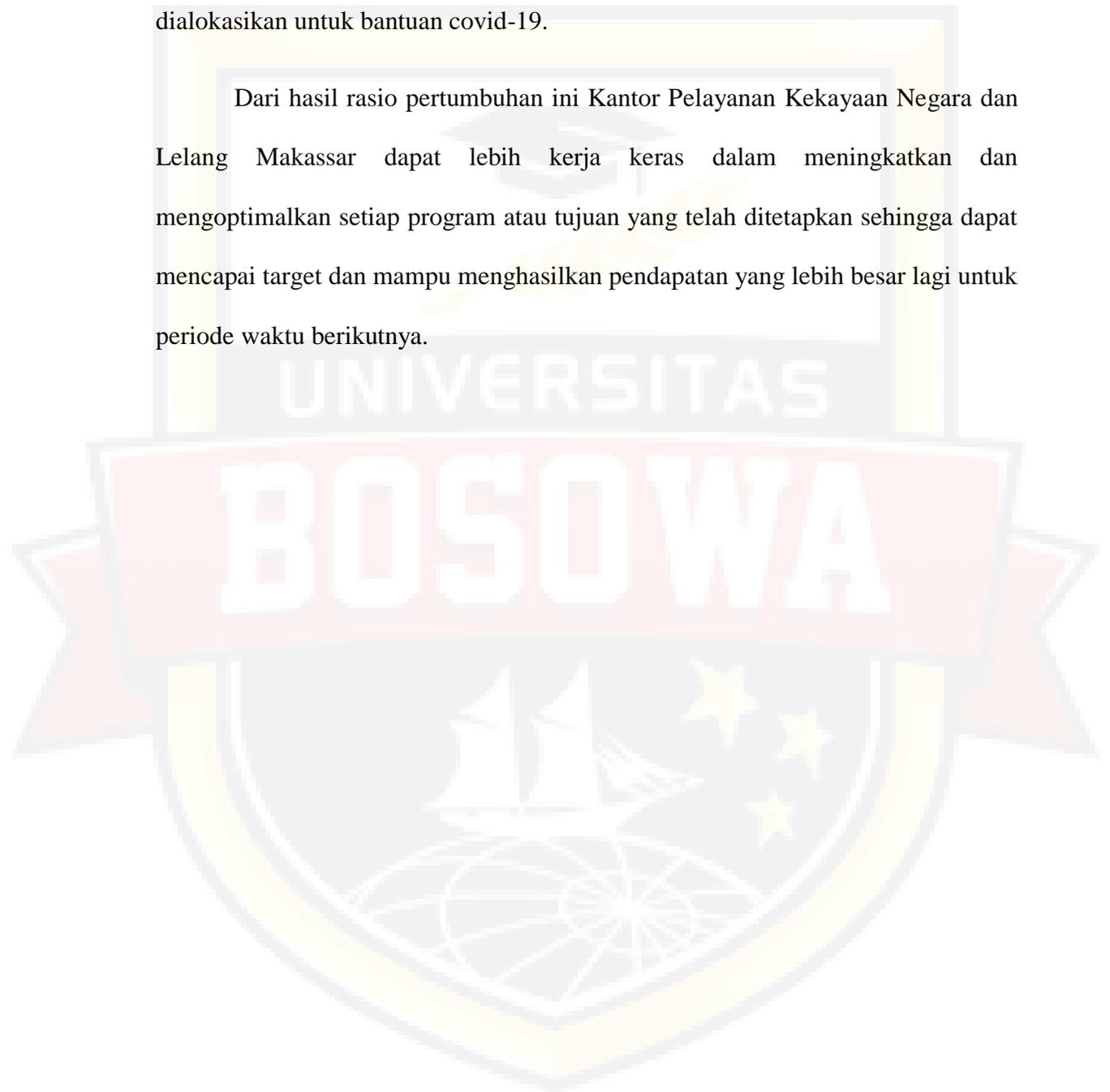
atau penerimaan yang telah direncanakan sebelumnya terlalu rendah dibanding dengan realisasi pendapatan yang diterima disetiap tahun, sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil rasio efektivitas yang mana hasilnya lebih dari 100% yang artinya sangat efektif. Kinerja KPKNL Makassar dalam merealisasikan pendapatan dinilai sangat baik jika dilihat dari rasio efektivitas.

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan KPKNL Makassar terus meningkat dari tahun ke tahun, jika dilihat dari tahun 2019 presentase rasio pertumbuhan sebesar 12,69%, kemudian di tahun 2020 naik lagi menjadi 22,81%, dan terus mengalami kenaikan sampai pada di tahun 2021 sebesar 63,48%. Rasio pertumbuhan selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus ini menandakan bahwa KPKNL Makassar mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif, karena hasil kinerja anggaran pendapatan mengalami pertumbuhan positif maka adanya peningkatan atas kinerja pendapatan.

Sedangkan jika dilihat pada rasio pertumbuhan belanja KPKNL Makassar yang ada ditabel 4.8 selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, ditahun 2019 presentase rasio pertumbuhan belanja bernilai negatif yaitu -1,02%, kemudian pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan sebesar 7,09%, ditahun 2021 mengalami penurunan yang bernilai negatif yaitu -7,00%. Bernilai negatif nya rasio pertumbuhan belanja di tahun 2019, kemudian sempat mengalami kenaikan ditahun 2020, tetapi turun lagi ditahun 2021 dikarenakan menurun pula realisasi belanja tiap tahun dan hal ini dipengaruhi oleh anggaran atau target belanja yang ditetapkan mengalami penurunan. Terlebih lagi pada tahun 2021 jika dilihat dari

realisasi anggaran belanja pegawai sama sekali tidak ada bahkan 0%, karena dampak dari pandemi covid-19 maka realisasi anggaran belanja pegawai dialokasikan untuk bantuan covid-19.

Dari hasil rasio pertumbuhan ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dapat lebih kerja keras dalam meningkatkan dan mengoptimalkan setiap program atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai target dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi untuk periode waktu berikutnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dimasa Pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan yaitu kuantitatif, yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar lebih memprioritaskan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang, dari pada belanja modal. Maka dapat dikatakan belanja rutin dan belanja modal tidak stabil dari tahun ke tahun.
2. Kinerja keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dalam merealisasikan pendapatannya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa dikatakan sangat efektif atau sangat baik karena melebihi dari target penerimaan/pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya di tiap tahun dari tahun 2019-2021, walaupun dimasa pandemic covid-19 tetapi rasio efektivitas nya melebihi dari 100% yang berarti sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan nya terus meningkat dari tahun ke tahun.

3. Kinerja Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan secara terus menerus yang berarti bahwa adanya pertumbuhan pendapatan secara positif dan peningkatan atas kinerja pendapatan. Sedangkan jika dilihat dari rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan dan juga ketidakstabilan yang mengakibatkan bernilai negatif.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Instansi

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah sangat efektif serta lebih ditingkatkan lagi agar tetap optimal dan tujuannya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar diperiode tahun berikutnya.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan analisis lebih banyak lagi dengan menggunakan rasio lebih banyak lagi yang mungkin akan berkembang ke depannya. Diharapkan juga agar lebih teliti dan lebih terperinci supaya hasil yang akan diperoleh lebih tepat dalam mengukur kinerja keuangan suatu instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal, R. A. (2020). Pengaruh Work from home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 223-242.
- Beni, Pekei. 2016. Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Farrell, K. (2017, November). Working from home: A double edged sword. In *Home Renaissance Foundation Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 0-26).
- Gilarso, T. SJ. 2003. *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Harahap, S. S. 2016. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, cetakan ke sepuluh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, S. Ma'sut, Ilmiha, & Effendi, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 5(6).
- Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- 2012. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2015. Analisis Laporan keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service)
- 2016. Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition. Jakarta: Grasindo.
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 03 Januari 2001 Tentang BUDPLN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Badan Urusan Piutang Negara.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 Struktur Organisasi BUPN.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. 01/2006 pasal 30.

Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17.

Sijabat, M. Y. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7, 81-92.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-Undang Nomor 517/MK/IV/1976 Tentang Susunan Organisasi dan Kerja BUPN.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/2022/15Juli2022/13.44 WITA>.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2020

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR 538019

Kode Lap : LRAF.S
Tanggal : 02/06/22 2:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
		3	4	5	6	3	4	5	6
1	2								
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	12,959,699,000	14,911,170,933	1,951,471,933	115	12,150,890,000	14,578,624,312	2,427,734,312	120
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	12,959,699,000	14,911,170,933	1,951,471,933	115	12,150,890,000	14,578,624,312	2,427,734,312	120
B	BELANJA								
	BELANJA PEGAWAI	2,089,458,000	1,910,267,067	(179,190,933)	91	2,599,078,000	2,574,550,702	(24,527,298)	99
	BELANJA BARANG	2,194,455,000	2,128,341,749	(66,113,251)	97	1,845,252,000	1,658,080,658	(187,171,342)	90
	BELANJA MODAL	888,072,000	869,393,472	(18,678,528)	98	350,008,000	350,007,175	(825)	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	5,171,985,000	4,908,002,288	(263,982,712)	95	4,794,338,000	4,582,638,535	(211,699,465)	96
C	PEMBIAYAAN								
					0				0

Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020-2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR 538019

Kode Lap : LRAF.S
Tanggal : 02/06/22 2:07 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_faoe_salker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	13,478,286.000	24,377,910.536	10,899,624,536	181	12,959,689.000	14,911,170.933	1,951,471,933	115
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	13,478,286.000	24,377,910.536	10,899,624,536	181	12,959,689.000	14,911,170.933	1,951,471,933	185
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	2,089,458.000	1,910,267,067	(179,190,933)	91
	BELANJA BARANG	1,492,398.000	1,449,771.379	(42,626.621)	97	2,194,455.000	2,128,341,749	(66,113,251)	97
	BELANJA MODAL	21,500.000	20,670.000	(830.000)	96	888,072.000	869,393,472	(18,678,528)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,513,886.000	1,470,441,379	(43,456,621)	97	5,171,985.000	4,908,002,288	(263,982,712)	95
C	PEMBIAYAAN				0				0